

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan isu utama dari 17 Tujuan Pembangunan Global (TPG) sekaligus menjadi komitmen bersama dari 193 Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk di dalamnya adalah swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Perjanjian global ini mengindikasikan bahwa permasalahan kemiskinan merupakan tantangan bangsa-bangsa di seluruh dunia yang semestinya ditangani bersama secara komprehensif, integratif, dan inklusif. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan berkaitan dengan berbagai dimensi, baik dimensi sosial, ekonomi, politik, agama, maupun dimensi waktu.

Kemiskinan didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai suatu keadaan kekurangan yang terlihat dari rendahnya konsumsi makanan dan rendahnya kondisi kesehatan serta tingkat pendidikan dan kurangnya akses terhadap hal-hal tersebut serta kondisi perumahan yang rendah. Menurut Gonner, et al. (2007: 12), kemiskinan merupakan kondisi dimana kurangnya sarana, kemampuan, kebebasan, dan pengambilan keputusan yang lebih baik untuk masa depan. Dari definisi konsep kemiskinan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan bisa diukur secara langsung dengan mengamati ketidakmampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Sampai sekarang, kemiskinan tetap menjadi tantangan yang sangat kompleks bagi banyak negara di dunia, khususnya negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Di Indonesia, pada September 2022, persentase orang yang hidup di bawah garis kemiskinan adalah 9,57%, atau sekitar 26,36 juta orang. Tingkat kemiskinan ini sedikit lebih tinggi dari Maret 2022 (9,54%) tetapi masih lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan pada September 2021 (9,71%). Ambang batas garis kemiskinan pada September 2022 meningkat sebesar 5,95% menjadi Rp 535.547 dari sebelumnya Rp 505.468 pada Maret 2022. (BPS, 2023). Jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2020-2022 dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1. 1 Jumlah penduduk miskin Indonesia Tahun 2020-2022

Tahun	Bulan	Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)		
		Perkotaan	Desa	Perkotaan+Desa
2020	Maret	11.16	15.26	26.42
	September	12.04	15.51	27.55
2021	Maret	12.18	15.37	27.54
	September	11.86	14.64	26.50
2022	Maret	11.82	14.34	26.16
	September	11.98	14.38	26.36

Sumber: BPS(2023)

Didasarkan data pada tabel 1.1 bisa diberikan kesimpulan jika pada September 2022 penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,36 juta orang. Jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin meningkat 0,20 juta orang. Sebaliknya, jika dibandingkan dengan September 2021, jumlah penduduk miskin berkurang 0,14 juta orang. Persentase penduduk miskin pada September 2022 adalah 9,57 persen, meningkat 0,03 persen terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 persen di September 2021.

Sesuai dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), penanggulangan kemiskinan atau pencapaian *No Poverty* adalah prioritas pertama, yang bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan di dalam segala bentuk di seluruh dunia. Kemiskinan adalah permasalahan global yang terus menjadi fokus perhatian dari berbagai negara. Dalam upaya mengatasi hal ini, SDGs menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai tujuan utama yang harus diperhatikan dan dikerahkan upaya untuk mencapainya.

Kemiskinan ekstrem merupakan masalah multidimensi dimana mencakup banyak aspek. Kemiskinan ekstrem adalah keadaan dimana seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar berupa kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi. Kondisi ini tidak hanya terbatas pada pendapatan mereka tetapi juga pada akses mereka terhadap layanan sosial (PBB, 1996).

Bank Dunia mendefinisikan penduduk yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity) dianggap miskin ekstrem. PPP dihitung dengan menggunakan "*absolute poverty measure*" yang konsisten antar negara dan antar waktu. Dengan kata lain, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp. 10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan (BPS,2021). Sehingga misalnya dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau di bawah Rp. 1.288.680 per keluarga per bulan (BPS, 2021). Pada tahun 2021, 10,14% atau 27,54 juta orang di Indonesia

berada dalam kategori miskin, dengan 2,14 persen atau 5,8 juta orang yang berada dalam kategori miskin ekstrem (BPS, 2021).

Penanggulangan kemiskinan pada dasarnya merupakan tugas utama yang harus diprioritaskan dalam rangka mencapai Indonesia Maju. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin ekstrem pada tahun 2022 mencapai 5,59 juta jiwa, atau setara 2,04 persen dari total penduduk Indonesia. Angka tersebut mengalami penyusutan karena tingkat kemiskinan ekstrem pada 2021 adalah 4 persen atau 10,86 juta jiwa. Dilansir dari tnp2k.go.id, meskipun tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia telah menurun, hasil yang diperoleh sejauh ini belum memuaskan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tingkat kemiskinan ekstrem masih sangat tinggi, bahkan mungkin meningkat di beberapa wilayah. Untuk mencapai target nasional penghapusan ekstrem pada 2024 mendatang, diperlukan upaya yang lebih gencar lagi dari seluruh pemangku kepentingan dan upaya kolaboratif agar target nasional penghapusan ekstrem pada 2024 mendatang bisa tercapai.

Melihat dari fenomena belum optimalnya penanggulangan kemiskinan ekstrem, maka dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dengan adanya Inpres tersebut, maka pada tahun 2022 telah ditentukan wilayah prioritas yang secara bertahap diperluas hingga mencakup seluruh Kabupaten/Kota dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022. Dikutip dari tnp2k.go.id, pada tahun 2021 upaya pengentasan kemiskinan ekstrem difokuskan

pada tujuh Provinsi dan diprioritaskan pada 35 Kabupaten. Jumlah penduduk dalam kategori kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem di Tujuh Provinsi

Provinsi	Jumlah	Presentase
Jawa Barat	941.860	37%
Jawa Tengah	581.968	23%
Jawa Timur	508.571	20%
Nusa Tenggara Timur	212.672	8%
Papua	196.120	8%
Maluku	97.747	4%
Papua Barat	39.357	2%
Jumlah	2.578.295	

Sumber: Diolah, BPS 2023

Berdasarkan tabel 1.2 merupakan tujuh Provinsi yang diprioritaskan pada 35 Kabupaten di masing-masing provinsi yang telah mewakili 20 persen jumlah penduduk miskin secara nasional yang berjumlah 10,4 juta jiwa, yang berarti pada tahun 2021 ini akan menasar 2,1 juta jiwa atau 899 ribu rumah tangga. Salah satu provinsi fokus penanganan kemiskinan ekstrem tersebut adalah Jawa Tengah, dimana jumlah penduduk miskin ekstrem di Jawa Tengah Pada tahun 2021 mencapai 581.968 jiwa.

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024 menjelaskan bahwa Kabupaten Rembang merupakan salah satu dari 212 Kabupaten/Kota yang menjadi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kabupaten Rembang merupakan salah

satu daerah di Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah 1.036,70 Km² (Rembang Dalam Angka, 2023). Jumlah penduduk di Kabupaten Rembang pada tahun 2015 mencapai 1.288.566 jiwa yang tersebar di 14 kecamatan. Jumlah penduduk dari tahun 2011 hingga 2015 secara konsisten mengalami pertumbuhan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rembang, persentase penduduk miskin Kabupaten Rembang pada Maret 2023 berada di peringkat tujuh tertinggi dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah, sama posisinya dibanding tahun sebelumnya.

Berdasarkan data Kemiskinan Ekstrem di lima kecamatan yang dilakukan *piloting project* PKE jumlah penduduk yang masuk dalam kategori penduduk miskin ekstrim dapat dilihat berdasarkan jumlah penduduk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Desil 1-3 dapat dilihat pada tabel 1.4 dibawah ini.

Tabel 1. 3 Jumlah Penduduk Desil 1-3

Kecamatan	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Jumlah
Pamotan	6,075	7,528	7,059	20,662
Sumber	7,334	7,071	5,254	19,659
Sarang	3,978	6,749	8,454	19,181
Kragan	3,821	6,045	7,471	17,337
Pancur	4,458	5,96	5,268	15,686

Sumber: Data diolah, Bappeda Kabupaten Rembang Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Kecamatan Pamotan merupakan peringkat pertama dari lima kecamatan yang memiliki warga berada pada desil 1 sampai 3 yaitu pada angka 20,662 individu. Jumlah penduduk di kecamatan Pamotan pada tahun 2023 adalah sebesar 49745 jiwa, yang mana artinya 41% individu di kecamatan Pamotan masuk dalam kategori penduduk miskin ekstrim. Kecamatan

Pamotan memiliki beberapa desa yang dijadikan piloting project PKE yaitu Desa Gambiran, Desa Mlagen, Desa Ngemplakrejo, Desa Sendangagung, dan Desa Sumbangrejo. Penduduk yang terdata dalam program intervensi kemiskinan ekstrem di Kecamatan Pamotan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 1.5 dibawah ini.

Tabel 1. 4 Penduduk Penerima Intervensi Kemiskinan Ekstrem di Kecamatan Pamotan

Desa	Penerima Intervensi Kemiskinan Ekstrem	Persentase
Ngemplakrejo	240	24%
Mlagen	206	21%
Gambiran	205	21%
Sendangagung	233	24%
Sumbangrejo	104	11%
Total	988	100%

Sumber: Data diolah, BPS dan Bappeda Kabupaten Rembang Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, Desa Ngemplakrejo memiliki persentase penduduk yang menerima intervensi kemiskinan ekstrem tertinggi dari lima desa tersebut yaitu sebesar 24% atau sebanyak 240 penduduk. Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan pada satu kecamatan yang memiliki tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi, yaitu Kecamatan Pamotan, khususnya di Desa Ngemplakrejo. Hal ini akan dikaji lebih lanjut dalam pembahasan selanjutnya.

Unsur utama yang berperan dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Rembang ini adalah DINSOSPPKB Kabupaten Rembang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang. Tidak hanya itu, berdasarkan SK Bupati Nomor 050/0909/2022 Tentang Tentang Penetapan Desa

Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dan Perangkat Daerah Pendamping di Kabupaten Rembang Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Rembang menerapkan Program satu Perangkat Daerah (PD) non Kecamatan satu desa binaan dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem. Program ini dilakukan untuk mendampingi desa prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem. Program ini mengharuskan setiap OPD di Rembang berkewajiban membina satu desa untuk menekan angka kemiskinan. Dengan terjalinnya kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah daerah dan pihak terlibat lainnya, langkah-langkah tersebut merupakan upaya untuk menekan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Rembang, di kutip dari Wakil Bupati Rembang (rembangkab.go.id, 16 Januari 2023) menegaskan bahwa kolaborasi dan sinergi menjadi rumus penting dalam langkah lanjutan untuk mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Kabupaten Rembang. Dengan adanya kerjasama yang baik diharapkan mampu memberikan penanganan PKE menjadi lebih efisien. Pernyataan tersebut mencerminkan pentingnya kerjasama antara berbagai lembaga atau *collaborative governance* dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem.

Ansell dan Gash (2007:543) dalam (Intan Suci Rahmawati et al., 2022) mendefinisikan *Collaborative governance* merujuk pada kondisi pemerintahan di mana satu atau lebih organisasi publik berkolaborasi dengan pemangku kepentingan non-pemerintah untuk mengembangkan proses pengambilan keputusan formal yang berorientasi pada konsensus dan saling pengertian. Tujuannya adalah untuk mengimplementasikan kebijakan publik, manajemen publik, atau bahkan aset dengan cara yang lebih kolaboratif dan melibatkan berbagai pihak yang terkait. Emerson,

Nabatchi, & Balogh, 2012 menggambarkan konsep *collaborative governance* menjadi tiga dimensi yaitu: (1) *general system context*, (2) *collaborative governance regime* (CGR); dan (3) *collaborative dynamics* dan *actions* (Sadayi & Salsabila, 2022).

Dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dijelaskan bahwa Keterpaduan Program, Anggaran, dan Sasaran dalam arah kebijakan dan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem menggarisbawahi pentingnya mendorong pelibatan sektor non-pemerintah, seperti swasta/pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat/komunitas, yang diwujudkan melalui skema kerja sama dan pendanaan multisektor. Dalam konteks ini, pendanaan non-pemerintah menjadi alternatif yang penting dalam mendukung pelaksanaan program penghapusan kemiskinan ekstrem, baik di tingkat pusat maupun di tingkat desa/kelurahan. Skema pendanaan ini antara lain:

1. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*);
2. Pemberian dana dari masyarakat melalui amal (*charity*), filantropi dan pemanfaatan dana zakat, infaq dan shadaqah (zis); dan
3. Pendanaan multi donor untuk organisasi atau perusahaan yang menangani masalah sosial serta kegiatan yang memberikan dampak yang signifikan secara sosial.

Desa Ngemplakrejo Kecamatan Pamotan merupakan salah satu desa yang menjadi piloting program penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Rembang. Desa Ngemplakrejo dalam melakukan program PKE didampingi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang. Dalam program PKE ini, desa Ngemplakrejo membagi penduduk dalam delapan kategori kemiskinan ekstrem yaitu: pemenuhan air layak minum; sanitasi tidak layak; penyakit kronis; Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); disabilitas; pengembalian Anak Tidak Sekolah (ATS); Kepala Rumah Tangga (KRT) tidak bekerja, lansia, pelatihan atau *life skill*. Pada tahun 2022, hasil intervensi PKE dapat dilihat pada tabel 1.6 dibawah ini.

Tabel 1. 5 Hasil Intervensi PKE Desa Ngemplakrejo 2022

Indikator	Intervensi 2022	Selesai intervensi
Pembangunan RTLH	76	9
Perbaikan sanitasi	71	1
Bantuan kpd KRT Lansia	28	13
Pemenuhan air minum layak	27	0
Penyakit kronis	15	14
Pengembalian anak Tidak Sekolah	12	9
Pelatihan /life skill	7	5
Penguatan Disabilitas	4	4

Sumber: Data diolah, Bappeda Kabupaten Rembang Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut menjelaskan bahwa hasil sementara dari kolaborasi dalam penanganan atau intervensi kemiskinan ekstrem penanggulangan kemiskinan di Desa Ngemplakrejo adalah hanya 55 dari 240 warga yang masuk dalam intervensi kemiskinan ekstrem yang selesai diintervensi pada tahun 2022. Dalam program ini, Desa Ngemplakrejo hanya melibatkan sektor usaha atau bisnis pada program PKE hanya ada pada penanganan pelatihan/ *lifeskill* yaitu dari Bank Jateng.

Penanganan kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo melibatkan Bank Jateng yang memberikan bantuan pelatihan *life skill* yang merupakan salah satu indikator intervensi dalam penanganan kemiskinan ekstrem. CSR atau *Corporate Social Responsibility* adalah kegiatan bisnis dimana perusahaan mengulurkan tangan dengan kesadaran sosial kepada masyarakat sekitar yang memiliki kondisi yang kurang ideal sebagai sarana untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan berdampak positif pada lingkungan.

Permasalahan kolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo adalah belum adanya pertemuan yang dilakukan secara rutin. Berdasarkan data yang didapatkan pertemuan tatap muka dalam pelaksanaan tugas dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem belum rutin dilaksanakan, pertemuan rutin hanya berlangsung selama tiga kali yang digunakan untuk membahas rencana awal dan evaluasi kegiatan.

Selain itu, kompetensi sumber daya manusia juga menjadi persoalan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Kompetensi ini berkaitan dengan Satpol PP Kabupaten Rembang yang merupakan organisasi perangkat daerah yang mendampingi Desa Ngemplakrejo dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem sesuai amanat dari SK Bupati Nomor 050/0909/2022, dimana hal ini sangat berbeda dengan tugas dan fungsi dari Satpol PP itu sendiri, sehingga di awal kolaborasi berlangsung Satpol Pp mengalami kesulitan untuk memahami dan merencanakan program dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Kebijakan mengenai penanganan kemiskinan ekstrem menunjukkan bahwa *collaborative governance* diperlukan dengan melibatkan multi-stakeholder dalam perencanaan, penerapan, dan pengawasannya, terutama di Desa Ngemplakrejo. Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam implementasi masalah ini dapat meningkatkan efektivitas program prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem. Penelitian ini menitikberatkan pada tahapan proses *collaborative governance* dengan peran *stakeholder* dalam merancang model ideal untuk Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa Ngemplakrejo.

Atas uraian situasi dan kondisi proses *collaborative governance* dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa Ngemplakrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang, dimana masih menunjukkan beberapa permasalahan yang telah diuraikan merupakan identifikasi permasalahan dalam proses *collaborative governance* dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, pertanyaan penelitiannya adalah “Bagaimana *collaborative governance* dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa Ngemplakrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang”.

1.2 Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Tidak adanya struktur organisasi dalam pelaksanaan *collaborative governance* dalam penanggulangan kemiskinan Ekstrem di Desa Ngemplakrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang
2. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan Satpol PP Kabupaten Rembang dalam melaksanakan program karena pemberian tanggungjawab sebagai pendamping desa tidak sesuai dengan tugas dan fungsi instansi.
3. Proses kolaborasi dalam penanganan kemiskinan ekstrem lebih banyak melibatkan sektor pemerintah, pelibatan sektor swasta pada program PKE di Desa Ngemplakrejo hanya ada pada penanganan pelatihan/ *life skill*.
4. Masih minimnya pertemuan yang dilakukan secara langsung selama proses kolaborasi berlangsung.
5. Hasil sementara dari proses kolaborasi dalam intervensi kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo adalah hanya 55 dari 240 warga yang masuk dalam intervensi kemiskinan ekstrem yang selesai diintervensi pada tahun 2022.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang dapat menjelaskan fokus masalah penelitian, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Siapa *stakeholders* yang terlibat dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa Ngemplakrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana *Collaborative governance* dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa Ngemplakrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang?

3. Apa faktor pendukung dan penghambat *Collaborative governance* dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa Ngemplakrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang akan diteliti, terdapat dasar dari penelitian yang dijelaskan dalam tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan hal yang akan dicapai dari sebuah penelitian sejak dimulainya proses penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengidentifikasi *stakeholders* yang terlibat dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa Ngemplakrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang.
2. Menganalisis *collaborative governance* dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa Ngemplakrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang.
3. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat *collaborative governance* dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa Ngemplakrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai *collaborative governance* dalam diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan untuk membantu mahasiswa dalam melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis, dan kemampuan penulisan karya ilmiah dengan menerapkan pengetahuan teoritis yang didapatkan dari Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan pemahaman tentang *collaborative governance* dalam konteks Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa Ngemplakrejo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Publik.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa peningkatan pengetahuan dan pemahaman serta bermanfaat untuk dapat proses *collaborative governance* dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa Ngemplakrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang yang pada hakekatnya bermanfaat bagi peneliti secara khusus dan pembaca secara umum.

1.4.3 Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam proses *collaborative governance* dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa Ngemplakrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan dan pengetahuan tentang proses *collaborative governance* dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa Ngeplakrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang yang pada hakekatnya bermanfaat dan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu penelitian ini menggunakan ringkasan dari artikel penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti meliputi peneliti dan tahun penelitian, tujuan penelitian, teori, metode, serta hasil penelitian. Tinjauan pustaka digunakan untuk mengetahui penelitian sebelumnya dengan permasalahan yang sama agar nantinya dapat diketahui kesenjangan penelitian yang dapat menjadi fokus dari penelitian selanjutnya. Penelitian terkait *collaborative governance* terkait permasalahan kemiskinan ekstrem pernah dilakukan beberapa penelitian dengan perbedaan dari setiap penelitiannya. Pada tinjauan pustaka ini beberapa artikel terkait dengan *collaborative governance* dapat dijadikan kajian dan berkembang secara keilmuan. Berikut Tabel 1.7 dengan hasil tabel ringkasan penelitian terdahulu.

Tabel 1. 6 Penelitian Terdahulu

Peneliti, Tahun	Tujuan	Teori	Metode	Hasil
Peneliti: Sofa Miftakhul Iza, Ismi Dwi Astuti Nurhaeni	Mendeskripsikan proses <i>collaborative governance</i>	Teori <i>collaborative governance</i> menurut	Kualitatif	Proses tata kelola kolaboratif Program Gandeng Gendong di

2021	Program Gandeng Gendong di Kelurahan Tegalpanggung.	Ansel and Gash		Kelurahan Tegalpanggung telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat beberapa tantangan. Misalnya, belum semua elemen program dapat berpartisipasi, belum adanya pedoman dasar yang mendukung Gandeng Gendong, dan kelurahan belum dapat mendampingi kelompok-kelompok Gandeng Gendong dalam menyelesaikan berbagai masalah.
Peneliti Seferinus Niki, Endang Larasati, Sri Suwitri & Hardi Warsono 2020	Mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi <i>Collaborative Governance</i> dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur.	Teori <i>collaborative governance</i> menurut DeSeve (2007)	Kualitatif	Hasil menunjukkan bahwa <i>Collaborative Governance</i> dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur belum sepenuhnya memenuhi unsur substansi <i>Collaborative Governance</i> .
Peneliti: Nur Hazanah, Tjahya Supriatna, Ika Sartika, Eko Budi Santoso	Menganalisis Jaringan Kebijakan tentang pengentasan kemiskinan	Teori <i>collaborative governance dan jaringan kebijakan yang efektif</i>	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tujuh dimensi yang menentukan jaringan kebijakan

2023	ekstrem melalui pendekatan budaya, dan melengkapi penjelasan teoretis Frans Van Waarden tentang jaringan kebijakan.	berdasarkan teori Frans Van Waarden		dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bandung, yaitu: 1) Aktor, 2) Fungsi, 3) Struktur, 4) Institusionalisasi, 5) Tata Tertib, 6) Relasi Kuasa, dan 7) Strategi Aktor.
Peneliti: Delila Putri Sadayi , Lubna Salsabila 2022	Mengidentifikasi konsep dari tata kelola kolaboratif dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo.	Teori <i>collaborative governance</i> menurut Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2015	Kualitatif	Masyarakat sebagai subjek dan objek/aktor sangat penting dalam konsep tata kelola kolaboratif dalam pengurangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat.
Peneliti: Aulia Rahmawati, Galuh Pancawati 2021	Mengetahui proses <i>collaborative governance</i> dalam pengentasan kemiskinan melalui pengembangan desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Desa PRIMA) di Yogyakarta.	Teori <i>collaborative governance</i> menurut DeSeve	Kualitatif	Permasalahan kemiskinan mampu ditangani dengan inisiasi proses kolaborasi melalui Pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Desa PRIMA).
Peneliti: Muhammad Farhan Fathurohman,	Mengidentifikasi dan mengkaji peran pemerintah	Teori peran pemerintah menurut Siagian	Kualitatif	Pengentasan kemiskinan ekstrim masih berupa bantuan

Usep Dayat, Rachmat Ramdani 2021	daerah dalam pengentasan zona kemiskinan ekstrim di Kabupaten Karawang.			yang bersifat sementara, adanya keterasingan antara pihak swasta dan masyarakat serta sikap apatis yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah Karawang.
Peneliti: Nur Handayani, Riza Risyanti, Suripto, Fernandes Simangungsong 2023	Mendeskripsikan “collaborative governance” dalam pengentasan kemiskinan di Bangkalan, pihak pihak yang bertanggung jawab dan strategi penanggulangan kemiskinan apa yang digunakan di Bangkalan.	Teori <i>collaborative governance</i> menurut Ansel and Gash	Kualitatif	Hasil kajian menunjukkan bahwa <i>collaborative governance</i> dalam penanggulangan kemiskinan di wilayah Bangkalan tidak efektif dilihat dari “kondisi awal, design” institusional, “kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi” disebabkan belum adanya keseragaman standar dan persepsi mengenai masyarakat miskin
Peneliti: Abdul Rasyid Sahar, Rov Valiant Salomo 2018	Mendeskripsikan tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pinrang.	Teori <i>collaborative governance</i> menurut Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2015	Kualitatif	Studi ini menunjukkan bahwa membangun kepercayaan dan saling pengertian sebagai dua landasan terpenting dalam kolaborasi belum optimal. Selain itu, kapasitas pemimpin kolaborasi menjadi

				variabel yang menghambat proses membangun kolaborasi ke tingkat yang lebih dinamis dan berulang.
Peneliti: Mohamed Buheji 2019	Memperluas pemahaman tentang perkembangan yang diperlukan dalam model bisnis penanganan kemiskinan dan untuk menyadari pendekatan mana yang dapat membantu mendefinisikan kembali cara untuk mengatasi kemiskinan.	Mengkaji literatur dengan definisi kemiskinan dan bagaimana teorinya berkembang melalui pendekatan: “Capital Economy” Approaches (CA), “Socio-Economic” Approache (SA), “Inspiration and Behavioural Economies” Approaches (IBA).	Kualitatif	Diagnosis lebih lanjut tentang tantangan tentang bagaimana menangani mekanisme dan konstruksi kemiskinan tercermin dalam berbagai pendekatan yang diusulkan.
Peneliti: Gandisa Pangestuti Kiswoyo, Herbasuki Nurchayanto, Aufarul Marom 2023	Menganalisis bagaimana proses collaborative governance dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Banjardowo,	Teori <i>collaborative governance</i> menurut Ansel and Gash	Kualitatif	Temuan penelitian menunjukkan bahwa, meskipun pemahaman bersama dan hasil antara telah berjalan dengan baik, proses tata kelola kolaboratif dalam mengelola Kelurahan Banjardowo,

	Kecamatan Genuk, Kota Semarang.			Kecamatan Genuk, Kota Semarang, belum efektif dalam hal dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, dan komitmen terhadap proses. Selain itu, struktur masyarakat, bencana alam, kepentingan pemerintah, dan budaya/adat istiadat juga berpengaruh terhadap proses kolaboratif.
--	---------------------------------	--	--	---

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti memiliki kesamaan yaitu pada penggunaan teori dan analisis terkait dengan *collaborative governance*, namun penelitian tentang *collaborative governance* dalam penanggulangan kemiskinan masih belum banyak dibahas terlebih lagi yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan ekstrem sehingga yang akan menjadi perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu ada pada fokus dan subjek yang akan diteliti. Penelitian ini berfokus pada identifikasi *stakeholder* dan koordinasi pihak-pihak yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo, selain itu juga untuk melihat faktor pendukung dan penghambat dalam proses kolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang.

1.5.2 Kajian Teori

1.5.2.1 Administrasi Publik

Pengertian Administrasi Publik menurut Nicholas Hendry (dalam Maksudi, 2017:225) mendefinisikan administrasi publik sebagai perpaduan yang bervariasi dan asimetris antara teori dan praktik yang berusaha memajukan pengetahuan tentang pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat dan untuk merangsang pengembangan kebijakan publik yang lebih efektif dan efisien.

Sementara ahli lainnya yaitu elix A. Nigro dan L. Loyd G Nigro dalam Stillman (1984:2) menyatakan bahwa Administrasi publik mengacu pada upaya kolaboratif dalam domain publik dan mencakup cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan publik, sehingga menjadi komponen dari proses politik dan secara signifikan berbeda dengan administrasi privat, yang terkait dengan kelompok-kelompok privat dan individu yang memberikan bantuan kepada masyarakat umum. (Maksudi, 2017:223)

Administrasi publik menurut Willoughby dalam Dimock dan Dimock (1986:22) adalah fungsi untuk mengimplementasikan hukum sebagaimana dinyatakan dengan jelas oleh badan legislatif dan badan yudikatif pemerintah negara (Maksudi, 2017:225). Menurut Pasolong (2014:8) administrasi publik merupakan bentuk akan kolaborasi positif antara suatu kelompok atau lembaga dalam menjalankan pemerintah sehingga seluruh kebutuhan publik dapat terpenuhi secara efektif dan efisien.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan bentuk hubungan pemerintah dengan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan responsibilitas melalui penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat dengan menyediakan kebutuhan yang diperlukan masyarakat, dan juga membentuk lembaga pemerintah yang efektif dan efisien.

1.5.2.2 Paradigma Administrasi Publik

Menurut Kuhn, paradigma adalah suatu perspektif, nilai, metode, prinsip dasar, atau pendekatan yang dianut oleh komunitas ilmiah dalam memecahkan masalah pada suatu titik waktu tertentu (dalam Keban, 2012). Perkembangan paradigma administrasi sebagaimana dikemukakan oleh Nicholas Henry terbagi atas :

a. Paradigma Dikotomi Politik – Administrasi (1900-1926)

Dalam “*Politics and Administration*”, Frank J. Goodnow dan Leonard D. White menjelaskan bahwa ada dua fungsi yang berbeda dalam pemerintahan: Fungsi politik melibatkan pembuatan kebijakan atau aspirasi nasional, sementara fungsi administratif terkait dengan pelaksanaan kebijakan nasional. Menurut Goodnow, fokus dari paradigma ini adalah birokrasi pemerintahan, namun tidak secara jelas menguraikan metodologi atau prioritas penelitian (politik, kebijakan, dan pemerintahan) yang akan dibahas dalam administrasi publik.

b. Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi Negara (1927-1937)

Paradigma ini dimulai dimulai dari buku karya W.F. Willoughby yang berjudul "*Principles of Public Management*." Pada tahap ini berbagai

kontribusi dari bidang lain menambah warna pada pengelolaan administrasi, seperti industri dan manajemen. Selanjutnya, Willoughby, Gullick, dan Urwick mendiskusikan tentang POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*) sebagai fokus administrasi publik.

c. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Menurut John Gauss, teori administrasi negara adalah dasar politik dengan fokus pada birokrasi pemerintahan. Saat ini, administrasi publik menghadapi krisis identitas karena ilmu politik mendominasi dalam bidang administrasi publik.

d. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970).

Prinsip-prinsip manajemen dikembangkan dengan cara yang tidak logis dan komprehensif. Fokus utamanya adalah pada kinerja organisasi, analisis manajerial, dan pemanfaatan teknologi modern. Namun pada paradigma belum memiliki lokus yang jelas.

e. Paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970)

H. Simon membahas dua perspektif yang harus ditekankan dalam administrasi negara: perspektif administrasi, yang menekankan peningkatan pengetahuan dalam administrasi negara, dan perspektif administrasi publik, yang lebih memperhatikan masalah kebijakan publik. Paradigma ini meliputi teori organisasi, teori manajerial, dan kebijakan publik. Di sisi lain, paradigma administrasi publik lebih menyoroti isu-isu dan perhatian publik.

f. *Governance*

Administrasi publik berkembang seiring dengan kehidupan masyarakat. Penyelenggaraan administrasi publik juga berubah ketika tanggung jawab dan kekuasaan pemerintah meningkat. Sebagai sebuah pemerintahan, administrasi sangat penting dalam menjelaskan isu-isu baru, terutama yang menyangkut kemajuan keilmuan. Administrasi publik saat ini mencakup berbagai bentuk organisasi, terutama dalam proses perumusan kebijakan publik dan tidak kalah pentingnya dengan birokrasi dan lembaga pemerintah. Perlu juga melibatkan lembaga swadaya masyarakat dalam implementasi kebijakan secara ketat. Selain itu, hukum juga perlu diikuti dalam bidang administrasi sebagai bentuk pemerintahan yang mengutamakan proses politik dan mengajarkan hukum administrasi; politik dan ekonomi digunakan untuk menyelesaikan masalah dan keprihatinan sosial.

Posisi penelitian ini terletak pada paradigma *governance* karena dalam penyelesaian masalah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak di luar lembaga pemerintah, adapun isu-isu *governance* yang terjadi diantaranya *good governance*, *network governance*, dan *collaborative governance*, untuk penelitian ini lebih mengacu pada *collaborative governance* karena berkaitan dengan cara para pemangku kepentingan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang ada.

1.5.2.3 Governance

Berdasarkan paradigma terakhir dari administrasi publik yaitu *governance*. DeSev dalam Sudarmo (2011: 110-116) menjelaskan bahwa *governance*

merupakan hubungan kepercayaan diantara *governance actor or government* (Rahmawati et al., 2021). Hal ini juga mencakup, adanya peraturan tertentu yang ditaati secara seragam oleh semua pemangku kepentingan, dan ada mengenai cara kolaborasi yang akan dilakukan. Dalam hal ini, *governance* dapat disebut dengan *governance* jika jelas siapa yang menjadi anggota dan siapa yang tidak. Menurut Chema dalam Keban (2008:38), *governance* merupakan sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan yang menangani masalah ekonomi, sosial, dan politik dan dikelola melalui komunikasi yang baik dengan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta.

Dwiyanto (2018) menjelaskan bahwa penelitian tentang pemerintahan biasanya berfokus pada setidaknya tiga masalah utama yang membedakannya dengan pendekatan administrasi publik yang konvensional (Sunu et al., 2020). Isu tersebut antara lain pada:

- a. Dimensi kelembagaan didefinisikan sebagai sistem administrasi multisektor yang terdiri dari banyak pihak, baik dari pemerintah maupun di luar pemerintah (Dwiyanto, 2003). Sistem administrasi kelembagaan melibatkan banyak orang, jadi birokrasi biasanya menggunakan konsep tawar-menawar, kemitraan, kerja sama, dan produksi bersama sebagai cara untuk mendapatkan persetujuan yang biasanya digunakan oleh birokrasi.
- b. Aspek nilai, pada dimensi ini membentuk dasar kewenangan melalui implementasi administrasi publik yang efisien dan efektif yang kemudian diperkuat oleh tata kelola yang demokratis melalui partisipasi, kesetaraan, saluran sosial, manajemen berbasis konsensus, dan informalitas.

- c. Dimensi proses, dimensi ini menggambarkan bagaimana berbagai instansi dan organisasi dalam merespon berbagai isu publik yang muncul di lingkungannya (Dwiyanto, 2018). Proses menggambarkan rencana eksekusi atau kejadian terkait yang saling berkaitan dan secara bersama-sama mengubah produk menjadi sebuah tanggung jawab. Penelitian lain menunjukkan bahwa proses tersebut terdiri dari langkah-langkah yang jelas, atau tindakan yang mungkin dilakukan berulang kali untuk mencapai hasil yang diinginkan.

1.5.2.4 Collaborative Governance

A. Pengertian Collaborative Governance

Ansell & Gash (2008) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai tata kelola kolaboratif adalah jenis pemerintahan dimana satu atau beberapa badan publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berbasis konsensus konsensus, dan musyawarah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, program, atau proyek publik (Niki et al., 2020). Menurut Agranov & Mcguire (Joo Chang, 2009) *Collaborative Governance* lebih sering digunakan untuk mendorong kolaborasi sukarela di antara para pelaku di berbagai sektor karena permintaan klien sering kali melebihi sumber daya yang tersedia dan tenggat waktu pemerintah serta membutuhkan interaksi dengan berbagai organisasi di bidang urusan publik. Oleh karena itu, kerja sama perlu membangun kerangka kerja yang secara efektif mengelola tekanan yang

meningkat yang muncul dari manajemen lintas pemerintah dan sektoral (Rahmawati et al., 2021).

Menurut Emerson (2011:12), *collaborative governance* adalah proses dan kerangka kerja untuk merumuskan kebijakan publik dan keputusan manajemen yang melibatkan individu secara konstruktif, dengan mempertimbangkan kemampuan badan publik, tingkat pemerintahan, dan kesediaan badan publik, swasta, dan masyarakat umum untuk melaksanakan tugas-tugas bersama yang tidak dapat diselesaikan oleh satu entitas saja (Rahmawati et al., 2021).

Berdasarkan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini, *collaborative governance* dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang melibatkan beberapa sektor termasuk pemerintah, bisnis, dan sektor publik dalam menangani masalah publik sehingga kebutuhan publik terpenuhi.

B. Identifikasi Aktor dalam Kolaborasi

Menurut Freeman dalam Hanida et al. (2017) menyebutkan bahwa aktor atau yang dikenal pertama kali dengan istilah “*stakeholders*” mengacu pada individu atau kelompok yang dapat memberikan kontribusi dan memperoleh manfaat dalam proses pencapaian tujuan organisasi (Putri et al., 2020). Howlett dan Ramesh (Suwitri, 2008) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan aktor adalah semua individu yang terlibat dalam suatu kebijakan, baik organisasi publik maupun privat. Menurut Freeman (1984:37) dalam (Bellaastuti, 2020) kehadiran aktor sangat penting karena mereka adalah

pihak yang memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh dan juga menerima pengaruh untuk membantu mencapai tujuan program. Analisis aktor juga diperlukan untuk mengetahui posisi dan peran aktor.

Analisis stakeholder menurut Kismartini dan Yusuf (2015) dalam (Putri et al., 2020) merupakan proses terstruktur untuk memperoleh dan menganalisis pemangku kepentingan baik itu individu, kelompok dan organisasi. Menurut Ardianto (2008:124), pemetaan *stakeholder* dibagi menjadi dua kategori, yaitu internal dan eksternal, sebagai berikut:

1. *Stakeholders* internal adalah mereka yang berada dalam lingkup atau naungan organisasi.
2. *Stakeholders* eksternal merupakan *stakeholder* di luar lingkup atau naungan organisasi yang terlibat dalam kebijakan.

Menurut Maryono et al (dalam Setiwan, 2020), menjelaskan *stakeholders* dikategorikan menjadi:

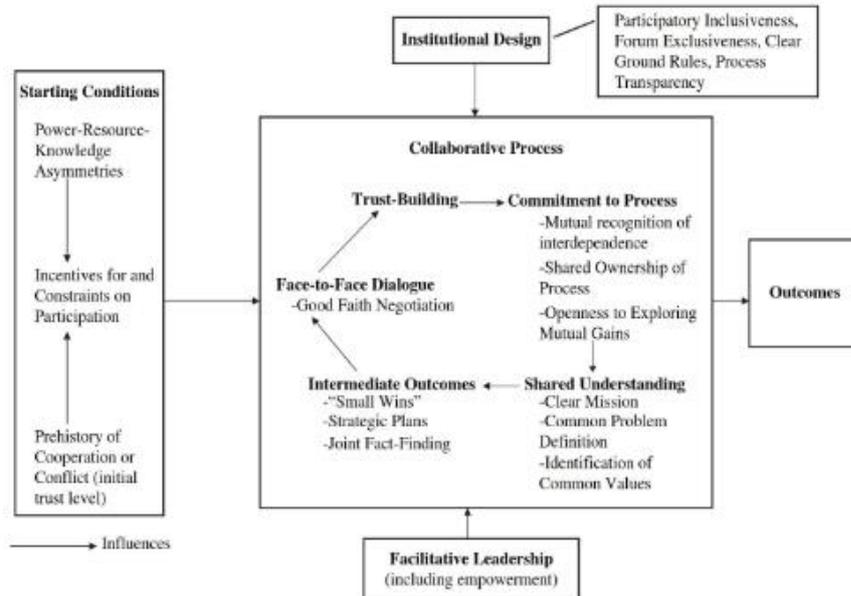
1. *Stakeholder* primer, adalah sekelompok pemangku kepentingan yang secara langsung memiliki kepentingan terhadap suatu kebijakan, program, maupun kegiatan. Masukan dari pemangku kepentingan primer dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam proses pengembangan keputusan. Lebih lanjut, Maryono (dalam Handayani & Warsono, 2017) pun menjelaskan bahwa *stakeholder* primer merupakan sekelompok orang yang menerima dampak secara langsung dari pelaksanaan kebijakan publik, baik itu dampak positif maupun negatif.

2. *Stakeholder* Sekunder, *stakeholder* sekunder atau pendukung merupakan *stakeholder* yang tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, maupun kegiatan. Meskipun demikian, *stakeholder* sekunder mempunyai rasa kepedulian yang besar pada pengembangan program sehingga mereka ikut serta dalam memberikan masukan dan pengaruhnya dalam proses pengembangan tersebut. Tidak hanya itu, keberadaan *stakeholders* sekunder pun dapat dikatakan cukup berpengaruh dalam pengambilan keputusan.
3. *Stakeholder* Kunci, adalah *stakeholder* yang memiliki kepentingan sekaligus kewenangan secara sah dalam pengambilan keputusan pada pelaksanaan suatu kebijakan. Umumnya, *stakeholder* jenis ini berasal dari unsur pemerintah yakni eksekutif dan lembaga legislatif yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

C. Model Kolaborasi menurut Ansell dan Gash (2007)

Collaborative governance didefinisikan oleh Ansell dan Gash (dalam Rahmawati et al., 2021) sebagai sebuah sistem pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga publik terlibat secara langsung dengan *stakeholder* non-negara dalam proses pembuatan keputusan kolektif formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif (musyawarah) dengan tujuan melaksanakan kebijakan publik atau manajemen publik. Berikut adalah model 1.3 yang menunjukkan sistem dari *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2007).

Gambar 1. 1 Model Collaborative Governance Ansell dan Gash



Sumber: Ansell dan Gash (2007)

a. Kondisi Awal

Menurut Ansell dan Gash, kondisi awal dalam model *collaborative governance* dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menjadi pendukung atau penghambat dalam kolaborasi. Faktor-faktor tersebut meliputi ketidakseimbangan kekuatan antara stakeholder, ketersediaan sumber daya dan pengetahuan, sejarah kerjasama sebelumnya, serta kepentingan dan visi bersama yang ingin dicapai. Kepemimpinan

b. Fasilitatif

Kepemimpinan Fasilitatif terkait dengan menyelenggarakan musyawarah antara *stakeholder*, menetapkan aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog antar *stakeholders*, dan pembagian keuntungan bersama.

c. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan merujuk pada tata cara dan aturan dasar yang menjadi landasan dalam menjalankan suatu kolaborasi. Ini sangat penting untuk menjaga legitimasi prosedural dari proses kolaboratif, memastikan transparansi proses, mengedepankan inklusivitas partisipan, dan menetapkan eksklusivitas forum.

d. Proses Kolaboratif

(1) Dialog Tatap Muka (*Face to face dialogue*)

Semua bentuk proses collaborative governance dibangun melalui dialog tatap muka langsung antara setiap stakeholder yang terlibat. Dalam collaborative governance yang berorientasi pada proses, dialog langsung sangat penting untuk mengidentifikasi peluang bersama. Melalui dialog tatap muka langsung, upaya untuk meminimalisir antagonisme dan sikap tidak menghormati antara stakeholder dapat dilakukan. Hal ini memungkinkan stakeholder untuk bekerja sama sesuai dengan tujuan dan kebermanfaatan bersama.

(2) Membangun Kepercayaan (*Trust building*)

Kolaborasi adalah upaya untuk membangun kepercayaan satu sama lain, bukan hanya negosiasi antar stakeholder. Setelah tahap awal kolaborasi, secepat mungkin perlu membangun kepercayaan agar para stakeholder tidak terjebak dalam egosentrisme organisasi. Oleh karena itu, membentuk kepercayaan membutuhkan pemimpin yang memahami pentingnya kerja sama.

(3) Komitmen Terhadap Proses (*Commitment to process*)

Dalam proses kolaborasi, komitmen memiliki hubungan yang kuat dan merupakan motivasi untuk terlibat dalam pemerintahan kolaboratif. Ini dibutuhkan dari masing-masing stakeholder yang terlibat untuk memiliki komitmen yang kuat untuk mencegah resiko yang terjadi selama proses kolaborasi. Ini adalah tanggung jawab masing-masing stakeholder untuk memperbaiki relasi yang dilakukan dan mengembangkan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

(4) Pemahaman Bersama (*Share Understanding*)

Semua pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi harus saling memahami tujuan yang dapat dicapai melalui kolaborasi. Jenis pemahaman yang berbeda ini dapat berupa misi bersama, tujuan bersama, objektivitas bersama, visi bersama, ideologi yang sama, dan banyak lagi. Pemahaman yang saling berbagi ini dapat berdampak pada kesepakatan untuk memahami dan mengartikan suatu masalah.

(5) Hasil Sementara (*Intermediate outcomes*)

Hasil lanjutan dari proses kerja sama muncul dalam bentuk keluaran yang nyata dan merupakan hasil proses yang sangat penting dan penting untuk mengembangkan momentum yang memungkinkan keberhasilan kerja sama. Hasil sementara akan muncul ketika tujuan yang mungkin dapat dicapai dan memberikan keuntungan dari kerja sama yang relatif konkrit, dan ketika dapat terjadi "*small wins*".

1.5.2.5 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Septiani,dkk.,2021), terdapat tiga faktor yang diidentifikasi sebagai indikator untuk faktor pendukung dan penghambat pada *collaborative governance* yang dapat dilihat melalui:

1. Faktor struktur sosial

Faktor struktur sosial adalah salah satu komponen yang sangat mempengaruhi proses kolaborasi. Di dalam struktur sosial terdapat hubungan antar stakeholder yang terkait dengan struktur perencanaan, tugas, dan fungsi masing-masing stakeholder. (Septiani et al., 2021). Berdasarkan pendapat dari Campbell (Septiani et al., 2021) Modal struktur sosial mengacu pada hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi, yang mencakup jaringan sosial, norma timbal balik, dan kepercayaan yang muncul dari hubungan tersebut. Struktur sosial terdiri dari berbagai komponen masyarakat, seperti sistem sosial yang terdiri dari keluarga, ekonomi, pemerintah, agama, pendidikan, dan lapisan sosial yang saling terkait.

2. Faktor kultural

Keinginan dan perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh kultur mereka, atau kebudayaan mereka. Setiap kultur terdiri dari komponen yang lebih kecil yang dirancang untuk memfasilitasi sosialisasi dan identifikasi yang unik bagi individu yang terlibat. Peranan tambahan adalah kelas sosial. Kelas sosial adalah kelompok atau divisi yang relatif homogen yang tetap menjadi kesatuan masyarakat, yang disusun secara hierarki dan memiliki nilai, minat, dan perilaku yang serupa. Faktor ini sangat berkaitan dengan budaya kerja

sama, yang mencakup kebiasaan yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam proses kerja sama.

3. Faktor kepentingan pemerintah.

Faktor kepentingan pemerintah berkaitan dengan kepentingan politik antar aktor yang bekerja sama. Salah satu bentuk kepentingan dari pemerintah adalah membuat kebijakan. Sudarmo (2011) dalam (Septiani et al., 2021) menjelaskan bahwa kepentingan baru dari masing-masing pemangku kepentingan dapat menyebabkan perubahan pada kesepakatan yang telah disetujui pada awal proses kerja sama, yang dapat menghambat proses. Akibatnya, diharapkan adanya konsistensi dalam proses kerja sama. Kepentingan politik antar pemangku kepentingan harus selaras dengan kepentingan pemerintah dalam pembuatan kebijakan. Ini dapat dicapai melalui desentralisasi dan kolaborasi para pemangku kepentingan.

Pendapat lainnya dari *Government of Canada* dalam (Sunu et al., 2020) yang termasuk dalam faktor politik diartikan bahwa terdapat keuntungan dari para pemimpin kolaborasi untuk terus melakukan inovasi dalam pencapaian tujuan politik yang kompleks dan kontradiktif untuk menghindari kegagalan kolaborasi. Selain itu, kepemimpinan dalam kolaborasi diperlukan untuk memberikan inspirasi dalam agenda yang harus mengarah pada pencapaian yang positif.

1.5.2.6 Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

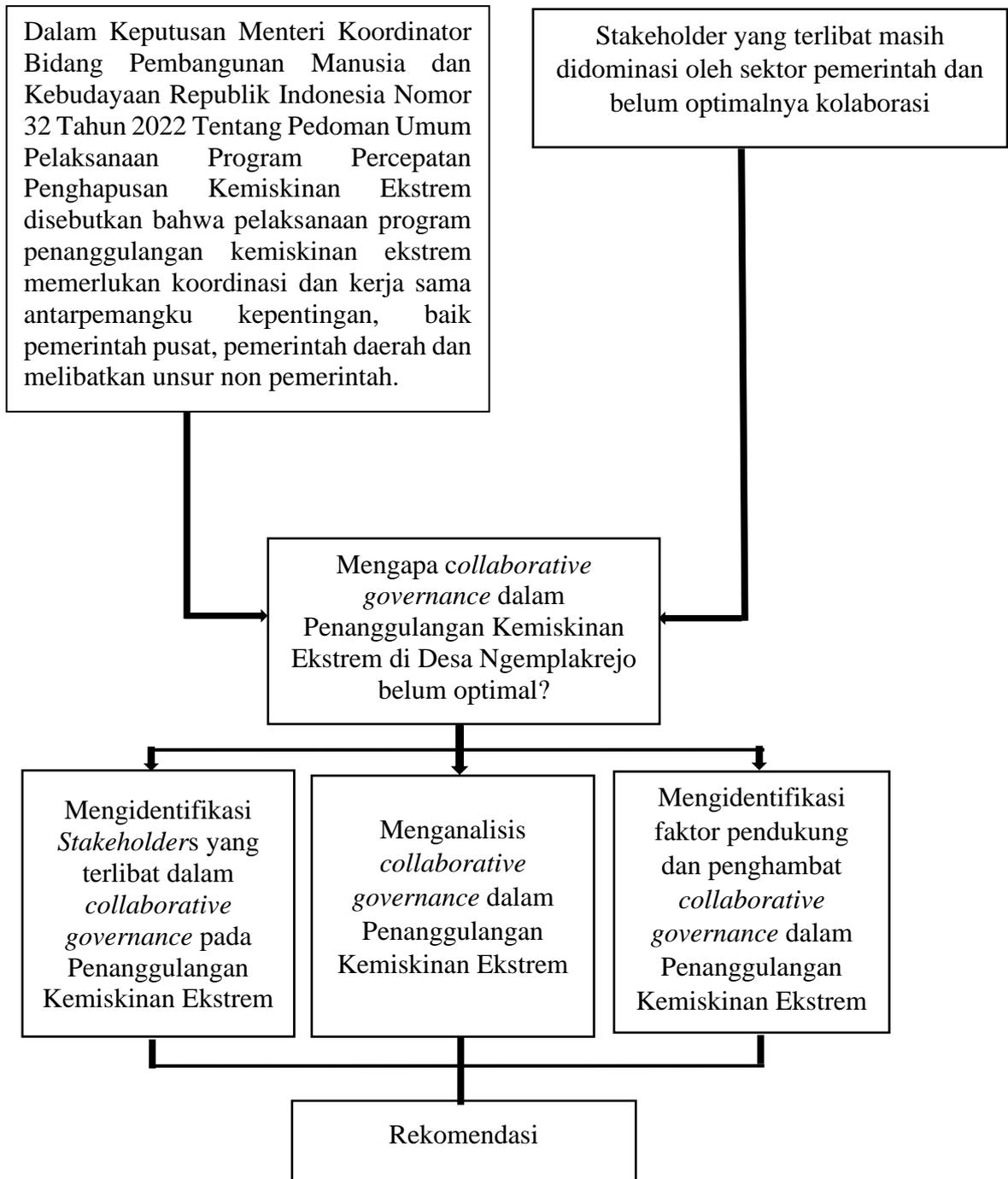
Kemiskinan ekstrem adalah keadaan di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, air minum bersih, sanitasi

yang memadai, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi. Kondisi ini tidak hanya terbatas pada pendapatan tetapi juga pada kemampuan mereka untuk mendapatkan akses ke layanan sosial (PBB, 1996). Menurut Bank Dunia, penduduk yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity) dianggap miskin ekstrem. PPP dihitung dengan menggunakan "*absolute poverty measure*" yang konsisten antar negara dan antar waktu. Dengan kata lain, seseorang dianggap miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah 10.739 rupiah per hari atau 322.170 rupiah per bulan (BPS, 2021).

World Bank (2019) menggambarkan kemiskinan ekstrem sebagai sesuatu yang merayap, karena perang, konflik, pertumbuhan populasi, migrasi dan kerapuhan (Buheji, 2019). Dalam menghadapi kondisi kemiskinan ekstrem, maka perlu dilakukannya penanggulangan yang dapat digunakan untuk mencegah atau menghapuskan kemiskinan ekstrem. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem mencakup semua upaya dari *stakeholders* untuk kesejahteraan masyarakat yang sebagai gambaran dari tujuan nasional bangsa Indonesia, dimana menurut Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem juga dibuat dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024, melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerjasama antar kementerian / lembaga maupun pemerintah daerah. Selain itu, diharapkan bahwa pemerintah dapat mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan tanggung jawab, fungsi, dan kewenangan mereka untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.dengan memastikan ketepatan

sasaran dan integrasi program antar kementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

1.5.3 Kerangka Pikir



1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 *Stakeholders* yang terlibat dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa Ngemplakrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang

Dalam mengidentifikasi *stakeholders* yang terlibat dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa Ngemplakrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang, peneliti melakukan pengelompokan *stakeholder* menurut Maryono (2005) (dalam Setiawan, 2020) yang dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. *Stakeholders* primer, *stakeholders* yang secara langsung berdampak pada suatu rencana yang melibatkan partisipasi mereka dalam kegiatan tersebut secara positif maupun negatif.
2. *Stakeholders* kunci, *stakeholders* yang memiliki otoritas, kekuatan, dan kepentingan yang signifikan dalam pembuatan kebijakan.
3. *Stakeholders* sekunder, *stakeholders* yang mempunyai kepentingan tidak langsung terhadap suatu rencana

Gejala yang akan diamati untuk mengidentifikasi aktor yang terlibat dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa Ngemplakrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang adalah:

- a. Aktor yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem
- b. Keterlibatan (langsung atau tidak langsung) setiap *stakeholders* dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem.

1.6.2 Collaborative Governance dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa Ngemplakrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang

Collaborative governance dalam penanganan kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang merupakan suatu proses kerjasama antara pemerintah dengan *stakeholders* dalam rangka menangani permasalahan kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang. *Collaborative Governance* dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo dapat diketahui pelaksanaannya melalui model kolaborasi menurut Ansell dan Gash, yaitu:

a. Kondisi Awal

Kondisi awal terjadi sebelum atau pada awal kolaborasi. Kondisi ini dapat membantu atau menghalangi kerja sama antara pemangku kepentingan dan antara lembaga atau organisasi dengan pemangku kepentingan. Aspek yang diteliti adalah:

1. Sejarah kerjasama dan konflik
2. Ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya, dan pengetahuan
3. Bentuk dorongan dan kendala

b. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan merujuk kepada legitimasi Dalam proses kerja sama, desain kelembagaan merujuk pada legitimasi prosedur yang menekankan bagaimana aturan main digunakan untuk menjalankan kerja sama. Aspek yang diteliti adalah:

1. Kejelasan aturan dasar

2. Inklusivitas partisipan
 3. Eksklusivitas forum
 4. Transparansi proses kolaborasi
- c. Kepemimpinan Fasilitatif

Apabila ada perselisihan, kepemimpinan yang dibutuhkan harus diterima dan dipercaya oleh para pemangku kepentingan sebagai cara untuk menyelesaikannya. Ini juga akan membantu tim *stakeholder* melaksanakan tanggung jawab mereka dalam pengaturan yang bekerja sama. Aspek yang diteliti adalah:

1. Fasilitasi
 2. Mediasi
 3. Pemberdayaan
- d. Proses Kolaboratif

Kolaborasi memerlukan tahapan di mana berbagai pemangku kepentingan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam praktiknya, proses kolaborasi adalah siklus berulang dari interaksi antar pihak yang terlibat dalam kolaborasi untuk mencapai inti dari kolaborasi. Dalam proses kolaborasi ini terdapat 4 tahapan yaitu:

1. Dialog tatap muka, aspek yang diteliti adalah:
 - a. Pertemuan rutin dalam proses kolaborasi
 - b. Komunikasi antar *stakeholder*
2. Membangun kepercayaan, aspek yang diteliti adalah:
 - a. Keterbukaan informasi antar aktor yang terlibat

- b. Upaya membangun kepercayaan
- 3. Komitmen terhadap proses, aspek yang diteliti adalah:
 - a. Tanggung jawab terhadap tujuan pelaksanaan program
 - b. Kesadaran akan peranan dari masing-masing *stakeholder*
- 4. Pemahaman bersama, aspek yang diteliti adalah:
 - a. Kejelasan visi dan misi bersama dalam kolaborasi
 - b. Pemahaman *stakeholders* mengenai nilai yang akan dicapai dari proses kolaborasi.
- 5. Hasil sementara, aspek yang diteliti adalah:
 - a. Adanya hasil atau keuntungan dari kolaborasi bagi seluruh *stakeholder*
 - b. Pembentukan rencana strategis dari program

1.6.3 Faktor penghambat *Collaborative Governance* dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa Ngemplakrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang

Dalam menganalisa faktor faktor penghambat *Collaborative Governance* dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Desa Ngemplakrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang, peneliti menggunakan tiga fenomena yang mempengaruhi *collaborative governance* dalam penelitian (Septiani, dkk.,2021) yaitu sebagai berikut:

1. Faktor struktur sosial

Salah satu faktor yang mempengaruhi proses kolaborasi adalah faktor struktur sosial, yang mencakup hubungan antar para pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi dan berkaitan dengan struktur perencanaan, tugas, dan fungsi

para pemangku kepentingan yang terlibat. Fenomena yang diamati dalam faktor struktur sosial adalah:

- a. Struktur jaringan
- b. Komitmen dari setiap *stakeholder*

2. Faktor kultural

Faktor ini sangat berkaitan dengan budaya yang dilakukan dalam kolaborasi, yang mencakup kebiasaan yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi. Kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari budaya kerja mereka sangat berkorelasi dengan faktor ini. Faktor kultural juga dipengaruhi oleh komunikasi dan partisipasi. Adapun fenomena yang diamati sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Manusia
- b. Komunikasi Kolaborasi
- c. Partisipasi

3. Faktor kepentingan pemerintah

Faktor ini adalah komponen yang sangat penting dalam budaya kerja sama, yang mencakup kebiasaan yang dimiliki oleh setiap orang yang terlibat dalam proses kerja sama. Faktor ini sangat berkorelasi dengan kualitas sumber daya manusia yang diukur dari budaya kerja mereka. Komunikasi dan partisipasi juga memengaruhi komponen kultural. Adapun fenomena yang diamati sebagai berikut:

- a. Kepemimpinan Inovatif
- b. Konsistensi kesepakatan

1.7 Argumen Penelitian

Kemiskinan ekstrem merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh banyak negara di dunia. Upaya untuk mengatasi kemiskinan ekstrem membutuhkan pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai *stakeholders*. Salah satu pendekatan yang menjanjikan dalam penanganan kemiskinan ekstrem adalah dengan *collaborative governance*. Chris Ansell dan Gash (2007) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai jenis tata kelola di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan formal, konsensus, dan deliberatif. Proses ini juga bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik. (Niki et al., 2020). Menurut Sunu et al., (2020) dalam pandangan administrasi publik, kolaborasi adalah kerja sama antara dua atau lebih orang untuk mencapai suatu tujuan. Ini juga sejalan dengan definisi administrasi sendiri, yang berarti kerja sama antara dua orang atau lebih orang untuk mencapai suatu tujuan.

Proses *collaborative governance* merupakan hal utama dalam proses penanggulangan kemiskinan ekstrem karena dengan adanya proses kolaborasi maka keseluruhan *stakeholder* dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam merumuskan kebijakan penanganan kemiskinan ekstrem. Hal ini sejalan dengan pendapat Doberstein (2016) dalam (Lawelai & Nurmandi, 2023) yang mengatakan bahwa tata kelola kolaboratif yang melibatkan kolaborasi dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan proses implementasi, telah muncul sebagai solusi potensial untuk mengatasi kemiskinan. Model ini mendorong keterlibatan aktif pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat

dalam mengatasi masalah kemiskinan, menciptakan lebih banyak manfaat pendekatan terpadu dan efektif. Tata kelola kolaboratif dapat membantu memastikan hal tersebut upaya pengentasan kemiskinan menjadi lebih inklusif, berkelanjutan, dan efektif.

Collaborative governance dinilai tepat untuk menggambarkan kerjasama suatu kolaborasi dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Desa Ngemplakrejo Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang yang mana implikasi dari *collaborative governance* yaitu kerjasama secara formal yang dilakukan oleh tiga pilar diantaranya pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam rangka upaya penanganan suatu masalah. Kolaborasi ini juga memungkinkan penggabungan sumber daya yang lebih besar, termasuk keahlian, dana, dan jaringan yang dapat memperkuat upaya penanganan kemiskinan. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan akan mendorong partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe penelitian

Menurut Rusidi dalam (Suryana, 2010) tipe-tipe penelitian ada 3, yaitu:

- a. Penelitian Deskriptif, adalah jenis penelitian yang berfokus pada aspek tertentu, biasanya menunjukkan hubungan variabel yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan apapun yang masih berlaku.

- b. Penelitian Eksplanatoris, penelitian ini dilakukan dengan memeriksa hipotesis atau hubungan sebab-akibat. Studi ini tidak lepas dari kontrol, di mana beberapa variabel tetap dan lainnya bebas.
- c. Penelitian Eksploratif, adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi lebih banyak masalah yang luas dan kompleks dan untuk menemukan topik baru.

Metode penelitian terdiri dari dua yaitu:

- a. Metode Kualitatif, Creswell dalam (Djam'an Satori, 2009) menjelaskan bahwa metode kualitatif merupakan suatu cara pengumpulan data dan hipotesis untuk memahami sesuatu yang didasarkan pada tradisi metodologis untuk menemukan masalah sosial. Peneliti melakukan mengidentifikasi secara menyeluruh; dengan kata lain, laporan tersebut ditulis dari sudut pandang sumber asli dan dilakukan secara alami.
- b. Metode Kuantitatif, yaitu metode penelitian yang didasarkan pada keadaan nyata, menggunakan populasi atau sampel tertentu untuk mengumpulkan data dan menganalisis data statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. (Sugiyono, 2013).

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan pengamatan dari penelitian secara langsung maupun tidak langsung terkait *collaborative governance* dalam penanganan kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo, Kecamatan Pamotan. Penelitian kualitatif ini dilakukan dalam memahami permasalahan ataupun hambatan dalam pelaksanaan *collaborative governance*.

1.8.2 Situs Penelitian

Menurut (Moleong, 2010) Situs penelitian merupakan lokasi di mana penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dari fenomena yang diamati. Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di latar belakang, situs penelitian yang ditetapkan adalah Desa Ngeplakrejo, Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau kelompok yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2010). Dalam hal ini, subjek penelitian adalah orang, kelompok, atau organisasi yang dapat memberikan informasi tentang fenomena atau kasus yang diperlukan peneliti untuk mendukung penelitian penulis. Informan juga disebut sebagai informan. Pemilihan informan menggunakan kombinasi *purposive* dan *snowball*; pertama, sampel dipilih secara sadar sesuai kebutuhan, dan kedua, informan berikutnya dipilih berdasarkan informasi dan saran dari informan sebelumnya sampai seterusnya. Informan dalam penelitian ini adalah seluruh *stakeholders* yang terlibat dalam proses kolaborasi yang meliputi:

1. Kepala Desa Ngeplakrejo
2. Sub. Koordinator Pembangunan Sosial Bappeda Kabupaten Rembang
3. Kepala Sub. Koordinator Perlindungan dan Jaminan Sosial DINSOSPPKB Kabupaten Rembang
4. Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Rembang

5. Tim Pemasaran Bank Jateng cabang Rembang
6. Pendamping PKH Desa Ngemplakrejo
7. Penerima intervensi kemiskinan ekstrem

1.8.4 Jenis Data Penelitian

Data dapat didefinisikan sebagai kumpulan bahan dan informasi yang dapat ditemukan di alam dan harus ditemukan oleh peneliti untuk dikumpulkan dan dipilah kembali (Subroto, dalam Nugrahani, 2014) Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan data kualitatif, dimana Lofland dan Lofland (2009:157) menjelaskan bahwa kata-kata, dokumen, dan informasi lainnya adalah sumber data kualitatif (Napitupulu, 2021:62). Dalam penelitian ini, data kualitatif meliputi tata letak geografis, objek, data profil dari keseluruhan *stakeholders* yang terlibat, hasil wawancara terkait dengan proses *collaborative governance* di Desa Ngemplakrejo, keberhasilan kolaborasi yang dilakukan, faktor penghambat dan pendukung keberlangsungan proses *collaborative governance*.

1.8.5 Sumber Data Penelitian

Sumber data menurut (Sugiyono, 2013) adalah segala sesuatu yang berguna untuk kelangsungan penelitian dan terkait dengan data penelitian. Sesuai dengan sumber data, maka dikelompokkan menjadi

1. Data Primer

Data primer dalam suatu penelitian diperoleh langsung dari sumbernya melalui pengukuran, penghitungan sendiri, observasi, wawancara, dan metode lainnya. (Hardani et al., 2020).

2. Data Sekunder

Menurut (Hardani et al., 2020) sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti melalui orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka, dokumen regulasi, serta penelitian terdahulu mengenai topik yang relevan dengan pembahasan mengenai *collaborative governance* dalam penanganan kemiskinan ekstrem.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data (Sugiyono, 2013:224). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Wawancara

Nazir (1999) dalam (Hardani et al., 2020:138) menjelaskan wawancara sebagai proses mendapatkan informasi tentang tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide*. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara atau melalui tanya jawab langsung. Penelitian ini juga menggunakan dokumentasi foto bersama dengan informan penelitian dalam pengumpulan data maupun dalam observasi Desa Ngemplakrejo.

2. Observasi

Sutrisno Hadi (1986) dalam (Sugiyono, 2013:145) mengemukakan bahwa, Observasi mencakup berbagai proses biologis dan psikologis. Dengan menggunakan proses observasi ini, peneliti dapat mengamati kondisi lapangan dengan mencatat atau merekam hal-hal yang dianggap penting bagi penelitian mereka. Dalam penelitian ini, metode observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi pasif, yang berarti bahwa peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi mereka tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Menurut Sugiyono (2008:227), partisipasi pasif berarti bahwa peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi mereka tidak ikut

3. Dokumentasi

Nugrahani (2014) menyatakan bahwa dalam Penelitian dapat menggunakan metode pengumpulan data yang didokumentasikan dengan menggunakan dokumen atau arsip yang tersedia sebagai sumber data sekunder. Selain itu, dokumen dapat menjadi tambahan untuk hasil penelitian, yang diperoleh dari wawancara dengan subjek penelitian, observasi lokasi dan peristiwa yang relevan dengan subjek penelitian, dan bahkan melalui kegiatan terkait dengan subjek penelitian. Pada penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari hasil penelitian, mempelajari, menganalisis, dan memahami literatur dari dokumen, arsip-arsip, dan laporan kegiatan resmi yang ada di dinas maupun pemerintah desa yang terlibat dalam proses *collaborative governance* di Desa Ngemplakrejo serta artikel ataupun informasi dari jurnal.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Bogdan dalam (Hardani et al., 2020:161-162) analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lain untuk membuat data dan temuannya mudah dipahami dan dikomunikasikan. Pada penelitian ini, menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dalam (Hardani et al., 2020:174) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/validasi.

1. Pengumpulan data merupakan prosedur yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi yang akan diperlukan berdasarkan hasil dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan *collaborative governance* dalam penanganan kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo.
2. Reduksi data adalah proses yang menekankan pada pemilihan, pengumpulan, penyederhanaan, dan transformasi data yang berasal dari catatan lapangan. (Patilima, 2004) dalam (Hardani et al., 2020:164). Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan apabila proses pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, menulis catatan, dan lain sebagainya dengan tujuan menyeleksi data atau informasi yang tidak sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
3. Penyajian data, menurut Miles dan Huberman dalam (Hardani et al., 2020:167) penyajian data merupakan sekumpulan informasi terorganisir yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penarikan kesimpulan. Dalam

penelitian ini, data disajikan dalam uraian singkat berupa tabel, grafik, dan lain sebagainya sehingga mempermudah pemahaman yang berkaitan dengan *collaborative governance* dalam penanganan kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo.

4. Penarikan kesimpulan/validasi yang dilakukan secara bertahap, data yang diperoleh selalu dianalisis kemudian dijelaskan dan diartikan dalam bentuk kalimat-kalimat dengan tujuan untuk menjelaskan fakta yang ada dalam lapangan. Berdasarkan penjelasan yang diberikan pada setiap tahapan proses penelitian, data yang ada diperiksa melalui berbagai sumber yang dikumpulkan dari rangkaian temuan penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi hasil penelitian. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar.

1.8.8 Kualitas Data

Penelitian kualitatif memiliki standar kualitas yang baik. Standar kualitas ini menunjukkan bahwa hasil penelitian kualitatif telah memberikan kepercayaan yang besar sesuai dengan penelitian saat ini di bidang tersebut. Triangulasi adalah metode pengumpulan data yang menggabungkan berbagai metode dan sumber data sebelumnya. (Sugiyono, 2013:241). Tiga cara dalam proses triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu, yaitu:

1. Triangulasi sumber adalah proses uji validitas data dari berbagai sumber yang berbeda.

2. Triangulasi teknik melibatkan pengujian kredibilitas data dari sumber yang sama menggunakan berbagai teknik, seperti wawancara, sebelum sinkronisasi dokumentasi, observasi, dan studi kepustakaan.
3. Triangulasi waktu adalah pengujian data dari sumber yang sama pada berbagai titik waktu. Dengan demikian, peneliti mengumpulkan berbagai data dari sumber yang sama, yang diperoleh dari pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan kemiskinan ekstrem di Desa Ngemplakrejo, Kecamatan Pamotan. Selanjutnya, teknik triangulasi data dilakukan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam.

Langkah uji keabsahan data yang telah diperoleh peneliti adapun cara yang dilakukan, antara lain:

1. Melakukan wawancara mendalam kepada informan.
2. Melakukan uji silang untuk membandingkan data dari informan dan hasil observasi lapangan.
3. Mengkonfirmasi hasil yang diperoleh kepada informan dari sumber-sumber lain.